

Abstract

Implementation of the Village Fund Policy for Disaster-Resilient Villages in Air Lanang, Curup Selatan District, Rejang Lebong.

There are a number of issues with the Disaster Resilient Village program's implementation in Air Lanang village. To begin with, there is an absence of assets, both HR and financial plan. The resources available for disaster risk reduction initiatives are inadequate. This activity is not supported by any special funds from Air Lanang village, South Curup District. In addition, there are no human resources. This study aims to: 1) implement village fund policies in the Disaster Tanguh Village in Air Lanang Village, South Curup District; and 2) identify obstacles to implementing village fund policies in Disaster Tanguh Village. The location of this study was Air Lanang Village in the South Curup District. This study employs qualitative descriptive research as its methodology. In this study, there are two types of data sources: primary data and secondary data. A purposive sampling technique, which is a sampling technique based on certain criteria that met the requirements of the research, was used by researchers to select research informants. Observation, interviews, and documentation were the methods used in this study to gather data. By comparing observations with data from interviews, observations, and documentation, triangulation was used in this study to test the validity of the research data. Data extraction, data presentation, and drawing conclusions are the data analysis methods used. The implementation of village fund policies in the Disaster Response Village in Air Lanang Village, Curup Selatan District, as well as communication between the chairman, Hamas, and other village officials, who always use transmission as the first communication to the local community to keep them aware of what might happen, are the findings of this study. Cure risks by planting trees or nurseries, alertness and anticipation by making appeals, providing early warnings, consistency by requesting assistance from ABRI, and community anticipation. Transmission to recovery by ensuring safe treatment, shelter, and food for refugees. Aside from that, the pre-disaster program's consistency in irrigating or cleaning existing rivers and asking the community to abide by the Disaster Resilient Village's rules and the BMKG's appeal, as well as the disaster mitigation program's consistency. For assets in our Catastrophe Strong Town program, we comprise of 3 sections, specifically There are 3 executive, advertising secretary and individuals. D Hindrances in executing town financing approaches in the Execution of the Catastrophe Reaction Town in Air Lanang Town, Curup Selatan Region are the absence of subsidizing, restricted offices and framework, absence of participation, absence of advising or moving abilities in misfortune reaction.

Key Words: Implementation, the Village Fund Policy, and Disaster Resilient Villages

Abstrak

Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong

Pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di desa Air lanang memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kekurangan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran. Anggaran atau sumber dana yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana tidak memadai. Tidak ada dana khusus dari desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan untuk kegiatan tersebut. Selain itu sumber daya manusia juga kurang. Penelitian ini ertujuan untuk 1) Implemetasi kebijakan dana desa dalam Pelaksanaan Desa Tanguh Bencana di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan 2) Hambatan dalam implemetasi kebijakan dana desa dalam Pelaksanaan Desa Tanguh Bencana di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan

Penelitian ini dilaksanakan di desa Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan sekunder. Peneliti dalam Pemilihan informan penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang memenuhi persyaratan dari penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dikumentasi. Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara triangulasi. dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan edukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Temuan penelitian ini adalah Implemetasi kebijakan dana desa dalam Pelaksanaan Desa Tanguh Bencana di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan dalam hal Komunkasi ketua, hamas dan perangkatat Desa lainnya selalu melakukan tranmisi sebagai komunkasi awal kepada masyarakat setempat agar tetap waspada dengan apa kemungkinan yang terjadi. Mengurasi resiko dengan memberikan pembibitan atau penanamanan pohon kesigapan dan antisipasi dengan memberikan himbauan, mengadakan peringatan dini, konsistensi dengan meminta bantuanan ABRI dan antisipasi masyarakat. tranmisi pada pemulihan dengan mengupayakan keselamatan pengobatan, tempat tinggal (pengungsian) dan pangan. Selain itu, konsistensi program pra bencana dengan pembuatan siring atau irigasi dan pembersihan sungai yang ada, konsistensi mitigasi bencana dengan meminta masyarkat mematuhi peraturan dari Desa Tangguh Bencana dan patuh pada himbauan BMKG Untuk Sumber daya dalam program Desa Tangguh Bencana ini kami terdiri dari 3 bagian yaitu Ketua, humas sekretaris dan anggota ada 3 orang. D Hambatan dalam implemetasi kebijakan dana desa dalam Pelaksanaan Desa Tanguh Bencana di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan adalah mengenai kurangnya pembaiyaan, keterbatasan sarana dan prasana, kurangnya keanggotaan, tidak adanya penyuluhan atau trening keterampilan dalam tanggap bencana.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Dana Desa dan Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana

1. Pendahuuan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Azwardi, Sukanto, 2014 hal. 29 – 41) Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai (Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, 2015, hal. 54)

BNPB sebagai lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana membuat kebijakan tentang kegiatan penanggulangan bencana yang bersifat pemberdayaan masyarakat guna mengurangi risiko bencana yakni Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Desa Tangguh Bencana). Program Desa Tangguh Bencana yang merupakan bentuk dari kebijakan publik pada dasarnya memang diperuntukkan bagi daerah. Sesuai dengan namanya yakni desa/kelurahan tangguh bencana maka pelaksanaan maupun pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah bertugas memfasilitasi program dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan desa/kelurahan. (BNPB, Peraturan Kepala

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

Pemerintah daerah Rejang Lebong Provinsi Bengkulu menigimplemetasikan kebijakan dana desa dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana khususnya pada Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan. Sebagai program yang menangani penanggulangan bencana di tingkat daerah ikut serta dalam penyelenggaraan program Desa Tangguh Bencana di Air Lanang Kecamatan Curup Selatan.

Air Lanang Kecamatan Curup Selatan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Rejang Lebong. Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan sebagian besar wilayahnya terdiri dari kawasan hutan dan lahan persawahan serta perbukitan dengan kondisi tanah yang didominasi oleh lahan perbukitan dan padat penduduk. Hal ini membuatnya rawan terhadap bencana bajir/longsor, kebakaran hutan dan lahan, banjir bahkan kebakaran pemukiman warga.

Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan memiliki beberapa titik yang rawan terhadap longsor dan banjir hutan dan lahan. Sebagian besar daerah yang rawan bencana kebakaran pemukiman adalah mereka yang memiliki rumah tua (rumah yang terbuat dari papan) sehingga api dengan mudah untuk melalapnya. Serta wilayah perladangan yang rawan lonsor. Pada tahun 2022 terdapat 5 kali kebakaran pemukiman (rumah warga), 3 kali longsor jalan umum, 2 kali longsor peladangan warga dan 2 kali kebanjiran wagra yang berada disekitar kali atau sungai. Sedangkan pada tahun 2023 ini sudah sering terjadi kebakaran rumah sebanyak 3 kali dan 4 kali kebakaran lahan.(WN, Komunikasi Internal, 4 Desember 2023)

Kegiatan program desa tangguh bencana dimulai dari ketika pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Lebih lanjut hadirnya program desa tangguh bencana ini di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan adalah agar desa mampu untuk beradaptasi dan mengenali ancaman bencana di wilayahnya terkhusus kebakaran hutan dan lahan serta mampu mengorganisir sumber daya yang ada untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Program Desa Tangguh Bencana memiliki

beberapa komponen di dalamnya. Berdasarkan Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ada enam komponen yakni legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana (Alhadi, 2019, hal. 2). Jazim Hamidi mengatakan bahwa, legislasi berasal dari kata *legislation* yang berarti perundang-undangan atau pembuatan undang-undang.” (Jazim Hamidi, 2012, hal. 46). Perencanaan dalam arti sederhana adalah proses mempersiapkan hal-hal yang hendak dikerjakan di waktu yang akan datang dalam rangka mencapai sebuah tujuan (Ana Widayastuti, 2021, hal. 2). Amruddin mengatakan bahwa kelembagaan adalah aturan main yang berlaku di masyarakat yang sudah disepakati bersama untuk menjadi sesuatu yang harus dipatuhi agar tercipta keteraturan antar sesama anggota masyarakat (Amruddin, 2021, hal. 74).

Dari pemaparan permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap program desa tangguh bencana yang diterapkan di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan, dengan judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong.

Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak..(Taufiqurokhman, 2014, hal. 3), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakangroup dimuat dalam isi kebijakan, 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, 4) apakah letak sebuah program sudah tepat, 5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan 6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. (Hayat, 2018, hal. 130)

George Edward III dalam buku John Fresly Hutahayan menyebutkan bahwa

terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

- a. Komunikasi. Tiga hal penting yang perlu dibahas dalam proses kebijakan komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Perlu ada keputusan yang telah dibuat dan adanya perintah pelaksanaan serta kejelasan arah komunikasi implementasi kebijakan. Di samping itu perintah implementasi harus konsisten dan jelas.
- b. Sumber daya. Untuk mendukung implementasi diperlukan sumber daya seperti pegawai atau karyawan yang memadai dan memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan fasilitas untuk mendukung penyampaian layanan publik.
- c. Tren atau perilaku. Tren implementasi sangat berpengaruh terhadap keefektifan suatu implementasi kebijakan. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka mereka cenderung akan menerapkan kebijakan yang diinginkan.
- d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Program Desa Tangguh Bencana

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas (PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi

kerentanan dan meningkatkan kemampuannya. (RI, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa program adalah sebuah rancangan kegiatan yang terencana dan berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan melibatkan berbagai unit.

2.2.1.1. Pengertian Program Desa Tangguh Bencana

Mengacu kepada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengertian dari desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitarnya, berdasarkan asal usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan pengertian kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota (RI, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004). Kelurahan setara dengan desa yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memiliki otonom luas seperti yang dimiliki sebuah desa.

Sedangkan desa tangguh bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana.

Dalam destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang

ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan. (BNPB, Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2016)

Secara umum kegiatan penanggulangan bencana diawali dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dalam tahap pra bencana kegiatan yang biasa dilakukan meliputi: (Sulistiyawan, 2020 hal. 17–27)

- 1) Pencegahan (*prevention*), kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan risiko bencana.
- 2) Mitigasi (*mitigation*), serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui mitigasi struktural dan non struktural.
- 3) Kesiapsiagaan (*preparedness*), serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna.
- 4) Peringatan Dini, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Dalam tahap saat bencana meliputi:

- 1) Tanggap Darurat, serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan , meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 2) Bantuan Darurat berupa kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

Dalam tahap pasca bencana meliputi:

- 1) Pemulihan, serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

- 2) Rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- 3) Rekonstruksi, pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
(Sulistiyawan, 2020 hal. 17–27)

Hambatan Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana

Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana maka kendala dalam menerapkan program Tangguh Bencana adalah 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Belum Memadai Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor ber-gaining position tinggi dalam pelaksanaan suatu program dalam mencapai keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan. Sumber daya manusia harus memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika dalam terlaksananya suatu program secara kuantitas sudah terpenuhi, namun apabila dari sisi kualitas dari SDM tersebut masih belum memadai, maka tetap memberikan pengaruh negatif terhadap keberhasilan pencapaian dari suatu program tersebut. 2) Minimnya Sarana dan Prasarana

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan sekunder. Peneliti dalam Pemilihan informan penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik

penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang memenuhi persyaratan dari penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara triangulasi. dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi kebijakan dana desa dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan

a) Komunikasi

Menurut Edward III dalam (John Fresly Hutahayan, 2010, hal. 97) komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dimaksud dan diterapkan dalam Desa Tangguh bencana di Desa Air Lanang bahwa Komunikasi ketua, hamas dan perangkatat Desa lainnya selalu melakukan transmisi sebagai komunikasi awal kepada masyarakat setempat agar tetap waspada dengan apa kemungkinan yang terjadi. Komunikasi awal merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.

b) Sumber daya

Edward III dalam John Fresly Hutahayan mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini bahwa Sumber daya dalam program Desa Tangguh Bencana ini kami terdiri dari 3 bagian yaitu Ketua, humas sekretaris dan anggota ada 3 orang. Dalam keanggotaan tidak ada pengkrekrutan secara khusus hanya saja selain beberapa anggota hanya mengharapkan bantuan dari warga baik oral maupun material.

c) Tren atau Pelaku

Menurut George C Edwards III Tren atau prilaku. Tren implementasi sangat berpengaruh terhadap keefektifan suatu implementasi kebijakan. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka mereka cenderung akan menerapkan kebijakan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan kosekuensi- konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). (John Fresly Hutahayan, 2010, hal. 104) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tren atau pelaku adalah tidak memerlukan ketarampilan khusus melainkan tergantung dengan kegiatan atau pekerjaan kita di saat bencana tersebut. Adapun keterampilan para biasanya

ialah dalam menggunakan alat bantu seperti cangkul dan lain sebagainya. Sedangkan dukungan yang diperoleh adalah dari BPBD yang merupakan pemberi dukungan utama demi terlaksananya program ini. Dan program ini pula di biaya oleh Dana Desa. Desa Tangguh Bencana menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menghindari kesalah pahaman. Berdasarkan analisis teori dan temuan di lapangan bahwa Untuk tren atau pelaku yang mana pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka mereka cenderung akan menerapkan kebijakan yang diinginkan, dan sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat secara moral. Dan bisa dikatakan cukup relevan dalam segi trend atau pelaku.

d) Birokrasi

Edward III mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi, yaitu: Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*). Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda, Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.

- 1) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hal Birokrasi perlu membangun karakteristik tersendiri sebab jangan sampai memberikan kerugian kepada masyarakat dan mengurangi penghasilan mereka. Norma yang ditanamkan adalah tentang norma sosial kerukunan agar masyarakat dapat hidup dengan tentram dan damai. Sedangkan dalam hal struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif hal ini tidak sepenuhnya

terlaksana pada program Desa Tangguh Bencana di Desa Air lanang. Sebab tidak memiliki pola-pola hubungan yang terjadi dalam badan eksekutif. Melainkan hanya organisasi saja.

Pengembangan Destana berangkat dari minimnya upaya yang dilakukan peMeintah desa dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Destana bertujuan meningkatkan kemampuan desa dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, melalui pembangunan fisik, penyadaran masyarakat, dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam proses tersebut, semua komponen di dalam desa dilibatkan, termasuk kelompok-kelompok berisiko atau rentan. Pada saat penetapan desa percontohan, rangkaian kegiatan di antaranya diisi dengan edukasi kepada masyarakat berupa pengetahuan mengenai kesiapan fasilitas, tenaga pendukung, serta prosedur penyelamatan pada saat bencana. Pada saat pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi.

Berdasarkan teori dan temuan di lapangan bahwa Birokrasi yang mana pelaksana sesuai dengan surat SK atau SOP yang sudah diberikan oleh bupati sebagai Desa Tagguh bencana. Namun belum mencakup pembagian kewenangan dalam menanggulagi bencana, belum memiliki hubungan antara unit-unit organnisasi lainnya. Dan masih berpaku pada bantuan secara suadaya oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keaggotaan.

b. Hambatan dalam implemetasi kebijakan dana desa dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan

Menurut Ameila Putrid an Zikri bahwa dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan suatu program hingga dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan sebagai pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan terhadap suatu bencana bahwa peranan peMeintah dalam penyediaan dan pemenuhan atas sarana prasarana masih kurang untuk menunjang keberhasilan program nagari

tangguh bencana(Amelia Putri Wirasari dan Zikri Alhadi, 2022, Jurnal Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam program Desa Tangguh Bencana ini adalah

1. Kurangnya pembiayaan. Kurangnya biaya memang menjadi permasalahan dalam setiap program. Salah satu subsistem dalam berjalannya program yang baik adalah subsistem pembiayaan. Pembiayaan sendiri merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya program yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
2. Keterbatasan sarana dan prasana. Dalam melaksanakan program destan ini ada beberapa sarana dan prasarana yang seharusnya di adakan. Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola organisasi atau program adalah mengenai fasilitas organisai. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, seperti: Gedung, ruangan [evakuasi](#) , alat-alat penyelamatan bencana. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses tersebut. Fasilitas tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan peralatan penyelamatan atau evakuasi
3. Kurangnya keanggotaan. Minimnya anggota membuat organisasi atau program tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa menjadi penghambat dalam menentukan keberhasilan suatu program. Untuk itu kelengkapan anggota meruakan hak yang harus diperhatikan
4. Tidak adanya penyuluhan atau trening keterampilan dalam tanggap

bencana. Sedangkan dalam Desa Tangguh Bencana ini anggota tidak dibekali hal-hal demikian.

Dari teori dan temuan di lapangan bahwa dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana maka kendala dalam menerapkan program Tangguh Bencana adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Belum Memadai Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor ber-gaining position tinggi dalam pelaksanaan suatu program dalam mencapai keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan. Sumber daya manusia harus memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika dalam terlaksananya suatu program secara kuantitas sudah terpenuhi, namun apabila dari sisi kualitas dari SDM tersebut masih belum memadai, maka tetap memberikan pengaruh negatif terhadap keberhasilan pencapaian dari suatu program tersebut. Minimnya Sarana dan Prasarana. Sebenarnya kendala tersebut juga ditemui dalam penelitian ini hanya saja memiliki kendala yang lebih banyak. Tidak hanya SDM dan sarana prasarana namun dalam hal keterampilan dan pembiayaan yang cukup dalam melaksanakannya.

5.1. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam hal Komunikasi ketua, hamas dan perangkatat Desa lainnya selalu melakukan tranmisi sebagai komunikasi awal kepada masyarakat setempat agar tetap waspada dengan apa kemungkinan yang terjadi. Mengurangi resiko dengan memberikan pembibitan atau penanaman pohon kesigapan danantisipasi dengan memberikan himbauan, mengadakan peringatan dini, konsistensi dengan meminta bantuan ABRI danantisipasi masyarakat. tranmisi pada pemulihan dengan mengupayakan keselamatan pengobatan, tempat tinggal (pengungsian) dan pangan. Selain itu, konsistensi program pra

bencana dengan pembuatan siring atau irigasi dan pembersihan sungai yang ada, konsistensi mitigasi bencana dengan meminta masyarakat mematuhi peraturan dari Desa Tangguh Bencana dan patuh pada himbuan BMKG Untuk melakukan konsistensi rehabilitasi dengan melakukan gotong royong bersama ABRI, rekonstruksi dengan memberikan bantuan secara langsung Untuk Sumber daya dalam program Desa Tangguh Bencana ini kami terdiri dari 3 bagian yaitu Ketua, humas sekretaris dan anggota ada 3 orang. Dalam keanggotaan tidak ada pengkrekrutan secara khusus hanya saja selain beberapa anggota hanya mengharapkan bantuan dari warga baik oral maupun material Tren atau pelaku adalah tidak memerlukan keterampilan khusus melainkan tergantung dengan kegiatan atau pekerjaan kita di saat bencana tersebut. Adapun keterampilan para biasanya ialah dalam menggunakan alat bantu seperti cangkul dan lain sebagainya. Sedangkan dukungan yang diperoleh adalah dari BPBD yang merupakan pemberi dukungan utama demi terlaksananya program ini. Dan program ini pula di biaya oleh Dana Desa. Desa Tangguh Bencana menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menghindari kesalah pahaman. Dalam hal Birokrasi perlu membangun karakteritik tersendiri sebab jangan sampai memberikan kerugian kepada masyarakat dan mengurangi penghasilan mereka. Norma yang ditanamkan adalah tentang norma sosial kerukunan agar masyarakat dapat hidup dengan tentram dan damai.

Kendala dalam program Desa Tangguh Bencana ini adalah pertama, kurangnya pembaiyaan. Kurangnya biaya memang menjadi permasalahan dalam setiap program. Kedua, keterbatasan sarana dan prasana. Dalam melaksanakan program destan ini ada beberapa saraa dan prasarana yang seharusnya di adakan. Ketiga, kurangnya keanggotaan. Keempat, tidak adanya penyuluhan atau trening keterampilan dalam tanggap bencana. Sedangkan dalam Desa Tangguh Bencana ini anggota tidak dibekali hal-hal demikian.

Saran-Saran

5.1.1. Kepala Desa

Kepala desa hendaknya mengatur pengeluaran khusus untuk program Desa Tangguh Bencana agar mereka dapat memberikan pembiayaan untuk melaksanakan program Desa Tangguh Bencana tersebut.

5.1.2. Segenap Anggota Desa Tangguh Bencana

Senantiasa iklas dan sigap dalam tanggap darurat bencana. Sebab bencana bisa datang kapanpun sehingga kesiapan sangat dibutuhkan

5.1.3. Masyarakat

Harus meningkatkan kekompakan dalam membantu anggota Desa Tangguh Bencana dalam menanggapi bencana dan termasuk proaktif dalam hal preventif bencana.

6. Daftar Pustaka

Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1 (Juni 2014)

BNPB. (2014). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. (2016, Mei 3). Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Retrieved September 29, 2021, from BNPB: <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-1-2012-tentang-pedoman-umum-desa-kelurahan-tangguh-bencana>

Buchari, A. (2019). Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia. Sembadha,

Chabib Sholeh, Heru Rochansjah(2015), Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung: FOKUSMEDIA,

Deddy supriadi, Dadang sholihin (2013) otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah, Jakarta:gramedia pustaka utama

- Hutahayan, J. F. (2019). Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yogyakarta: Deepublish.
- Mamik. (2014). Metode Penelitian Kesehatan. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Prihati. (2018). Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Salim. (2019). Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis. Jakarta: Kencana.
- Sayidah, N. (2018). Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Seran, S. (2020). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial. Yogyakarta: Deepublish.
- Taufiqurokhman, Kebijakan Publik. (Jakarta: FISIP Universitas Maestopo Beragama, 2014)
- Saibani. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (jakarta, Media Pustaka.2014)